JURNAL
Vocational Education Policy

Analisa program murid dalam penguatankesiswaan sekolah menengah kejuruan di Indonesia

Adrianus Patiung
1Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Korespondensi

Adrianus Patiung
tmr.adri.mrs.anne@gmail.com

Artikel Histori
Diajukan : 20 Januari 2026
Revisi Akhir : 29 Oktober 2026
Disetujui : 6 November 2026
Terbit : 15 November 2026

© 2026, Authors

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak

Purpose: Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program kesiswaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Indonesia, mencakup Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), penguatan karakter, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), roadmap akademik, dan pemetaan bakat minat. **Method:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi ex post facto dan Focus Group Discussion (FGD) selama tiga hari di Bekasi. Subjek penelitian terdiri dari para Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan SMK yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. **Findings:** Ditemukan tantangan utama berupa keterbatasan sosialisasi, kendala akses teknologi di wilayah 3T, fasilitas Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang minim, serta rendahnya keterlibatan industri (hanya 27% SMK memiliki teaching factory aktif). Praktik baik yang teridentifikasi mencakup MPLS berbasis budaya kerja dan pelibatan aktif alumni/orang tua. **Practical implications:** Studi ini merekomendasikan pembentukan Forum Wakasek Kesiswaan SMK Nasional yang legal, pelatihan karakter bagi guru, serta penerapan sistem pemantauan digital 7KAIH untuk menciptakan lingkungan vokasi yang aman dan inklusif. **Originality/value:** Penelitian ini menyajikan evaluasi empiris komprehensif skala nasional pertama terkait efektivitas pengelolaan kesiswaan pendidikan vokasi di Indonesia berbasis integrasi kebijakan dan konsensus praktisi lapangan.

Kata Kunci: Sekolah Menengah Kejuruan, Penguatan Kesiswaan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, Pendidikan Karakter, Roadmap Kesiswaan

Abstract

Purpose: *This study aims to analyze the implementation of student programs strengthening student affairs across Indonesian Vocational High Schools (SMKs), focusing on new student admissions (SPMB), school orientation (MPLS), character education, the 7 Habits of Great Indonesian Children (7KAIH), academic roadmaps, and talent mapping.* ***Method:*** *A combined ex post facto design and three-day Focus Group Discussions (FGDs) were employed in Bekasi. The research subjects comprised Vice Principals for Student Affairs representing all provinces across Indonesia.* ***Findings:*** *Key challenges include inadequate socialization, technological barriers in remote (3T) regions, insufficient special-needs facilities, and low industry engagement (only 27% of SMKs operate active teaching factories). Identified best practices feature work-culture-based orientation and active alumni and parental involvement.* ***Practical implications:*** *The study recommends establishing a legally recognized National Forum for Vocational Student Affairs Vice Principals, teacher character training, and a digital 7KAIH monitoring system to foster a safe and inclusive vocational environment.* ***Originality/value:*** *This research provides the first comprehensive nationwide empirical evaluation of vocational student affairs management in Indonesia, integrating policy directives with practitioner consensus.*

Keywords: *Vocational High School, Student Affairs, School Orientation Period, Character Education, Student Affairs Roadmap*

How to cite:
Patiung, A.(2026). Analisa program murid dalam penguatan kesiswaan sekolah menengah kejuruan di Indonesia. *Vocational Education Policy*, 1(2),236–254. https://doi.org/ 10.66599/wp.v1i2.9

Pendahuluan

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memegang peranan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, kompeten, dan adaptif terhadap dinamika pasar kerja global. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kejuruan secara spesifik dirancang untuk membekali peserta didik agar siap bekerja di bidang tertentu. Manajemen kesiswaan menjadi aspek krusial dalam menciptakan ekosistem pembelajaran vokasi yang tidak hanya terfokus pada kemahiran teknis, tetapi juga pada pengembangan karakter yang berkelanjutan. Perubahan paradigma pendidikan vokasi modern menuntut integrasi antara kecakapan akademik, keterampilan kerja (*employability skills*), dan pembinaan *soft skills* siswa secara komprehensif. Oleh karena itu, penataan dan evaluasi program kesiswaan secara nasional menjadi fondasi penting bagi keberhasilan transformasi pendidikan vokasi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pembangunan SDM unggul sebagai pilar utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dengan menempatkan revitalisasi SMK sebagai agenda prioritas. Penguatan program kesiswaan, seperti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), serta pembiasaan karakter 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), terbukti berdampak langsung pada pembentukan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan kondusif. Pengelolaan bidang kesiswaan yang efektif memfasilitasi pemetaan bakat minat serta pembentukan etos kerja siswa secara terukur. Tanpa pembinaan kesiswaan yang terstruktur, potensi peserta didik dalam beradaptasi dengan budaya kerja industri dan kompetensi abad ke-21 tidak akan terwujud secara optimal. Dengan demikian, kajian mendalam mengenai evaluasi pelaksanaan program kesiswaan memiliki signifikansi strategis bagi peningkatan mutu dan daya saing lulusan SMK secara nasional.

Meskipun program kesiswaan krusial bagi pengembangan siswa, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa baru sekitar 27% SMK yang memiliki *teaching factory* aktif dan kurang dari 15% memiliki kerja sama industri tingkat nasional. Kendala utama yang dihadapi sekolah mencakup disparitas akses teknologi di wilayah 3T, keterbatasan sarana bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), serta durasi MPLS dan distribusi petunjuk teknis yang belum optimal. Sebagian besar penelitian kesiswaan vokasi terdahulu hanya berfokus pada aspek teknis-kurikuler atau studi kasus terbatas pada satu sekolah tanpa menyajikan gambaran empiris berskala nasional. Ketiadaan konsensus nasional dan *roadmap* kesiswaan berjenjang dari kelas 10 hingga 12 menyebabkan pelaksanaan program kesiswaan berjalan secara parsial dan belum terintegrasi di berbagai daerah.

Untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengevaluasi pengelolaan kesiswaan SMK secara komprehensif di tingkat nasional berbasis data

empiris lapangan. Kebaruan metodologis diwujudkan melalui integrasi pendekatan *ex post facto* dan *Focus Group Discussion* (FGD) deliberatif yang melibatkan para Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dari berbagai provinsi di Indonesia. Studi ini menghadirkan kerangka kerja inovatif berupa usulan pembentukan Forum Wakasek Kesiswaan SMK Nasional yang legal serta penerapan sistem pemantauan karakter digital. Berbeda dari riset sebelumnya, penelitian ini secara eksplisit merumuskan *roadmap* kesiswaan kontekstual yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan siswa dari tingkat adaptasi awal hingga kesiapan kerja.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program murid dalam penguatan bidang kesiswaan di SMK se-Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan SPMB, MPLS, penguatan pendidikan karakter, dan implementasi program 7KAIH. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan *roadmap* kalender akademik kesiswaan yang terstruktur serta memetakan kompetensi dan bakat minat murid melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, studi ini mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat direplikasi secara nasional. Akhirnya, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi Direktorat SMK guna menciptakan lingkungan vokasi yang aman, nyaman, dan berorientasi masa depan.

Penelitian ini sangat mendesak mengingat pesatnya transformasi teknologi digital dan tingginya tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang adaptif di era industri. Isu-isu riil di satuan pendidikan seperti perundungan (*bullying*), kecanduan media digital, rendahnya kesiapan kerja, dan kesenjangan akses di wilayah 3T membutuhkan penanganan kebijakan yang cepat dan berbasis bukti. Hasil evaluasi ini memberikan jawaban langsung terhadap kebutuhan penguatan kepemimpinan vokasi dan tata kelola kesiswaan yang responsif terhadap tantangan zaman. Sinergi antara pemangku kebijakan, pihak sekolah, orang tua, dan dunia industri harus segera diwujudkan demi mengatasi kesenjangan kompetensi lulusan SMK.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur manajemen kesiswaan pendidikan vokasi berbasis bukti empiris. Secara praktis, riset ini menyediakan panduan aplikatif berupa *roadmap* kesiswaan berjenjang dan strategi pemetaan bakat minat yang dapat langsung diterapkan oleh praktisi sekolah. Dari sudut pandang kebijakan, temuan ini menyumbang landasan formulasi program kesiswaan nasional yang lebih inklusif dan terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri. Rekomendasi pembentukan wadah koordinasi nasional dan pemantauan karakter digital diproyeksikan mampu meningkatkan mutu serta kesiapan kerja lulusan SMK secara berkelanjutan. Pada akhirnya, kontribusi ini mendukung pencapaian visi pembangunan SDM nasional yang berkarakter unggul, mandiri, dan berdaya saing global.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain kombinasi *ex post facto* dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pendekatan *ex post facto* diterapkan untuk mengidentifikasi dan memetakan fakta empiris serta kondisi riil pelaksanaan program kesiswaan—termasuk SPMB, MPLS, penguatan karakter, 7KAIH, *roadmap* kesiswaan, dan pemetaan minat bakat—tanpa memberikan perlakuan atau intervensi terhadap variabel penelitian. Desain ini secara logis paling tepat digunakan karena seluruh fenomena kesiswaan telah berlangsung di sekolah. Selanjutnya, metode FGD difungsikan sebagai wadah deliberatif partisipatif untuk mengklarifikasi temuan *ex post facto*, menganalisis akar masalah, serta menyusun solusi kolektif berbasis pengalaman praktis para pengelola kesiswaan.

Partisipan, Subjek, atau Sampel Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari seluruh provinsi di Indonesia. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria utama: (1) menjabat secara aktif sebagai Wakasek Bidang Kesiswaan, (2) mewakili keterwakilan wilayah/provinsi di Indonesia, dan (3) memiliki pemahaman mendalam terkait operasional kesiswaan di sekolah masing-masing. Sebaran demografi partisipan dirancang secara proporsional untuk mencakup karakteristik wilayah urban, pedesaan, serta daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Tabel 1. Demografi Partisipan Penelitian (Wakasek Bidang Kesiswaan SMK)

Karakteristik Demografi	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Wilayah Regional	Jawa - Bali	14	36,8%
	Sumatera	10	26,3%
	Kalimantan	5	13,2%
	Sulawesi	5	13,2%
	Nusa Tenggara, Maluku, & Papua	4	10,5%
Status Sekolah	SMK Negeri	26	68,4%
	SMK Swasta	12	31,6%
Kategori Wilayah	Non-3T	29	76,3%

		(Perkotaan/Reguler)		
		Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)	9	23,7%
Pengalaman Menjabat Wakasek		< 2 Tahun	6	15,8%
		2 – 5 Tahun	22	57,9%
		> 5 Tahun	10	26,3%
Total Partisipan			**38**	**100%**

Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan secara intensif selama tiga hari pada tanggal 30 Juni – 2 Juli 2025 yang dipusatkan di Bekasi, Indonesia. Instrumen pengumpulan data terdiri dari dua perangkat utama: (1) lembar inventarisasi masalah *ex post facto* untuk merekam data kondisi empiris sekolah, dan (2) panduan diskusi (*FGD protocol*) yang mencakup enam fokus utama: evaluasi SPMB/MPLS, pendidikan karakter/7KAIH, pencegahan kekerasan, *roadmap* kesiswaan, pemetaan bakat minat, serta tata kelola ekstrakurikuler.

Keabsahan data (*trustworthiness*) dijaga melalui derajat keterpercayaan (*credibility*) dengan menerapkan triangulasi sumber (keterwakilan antar-wilayah), *peer debriefing* bersama tim fasilitator, serta konfirmasi ulang (*member checking*) di akhir setiap sesi FGD. Secara teknis, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil berbasis karakteristik wilayah dan isu spesifik. Setiap kelompok difasilitasi oleh moderator terlatih untuk menjaga dinamika diskusi agar tetap terfokus dan menjamin setiap partisipan memiliki kesempatan yang seimbang dalam menyampaikan argumentasi. Seluruh proses diskusi didokumentasikan melalui rekaman audio digital dan pencatatan verbatim (*transcription*).

Teknik Analisis Data

Data mentah yang diperoleh dari lembar *ex post facto* dan transkrip FGD dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Proses pengolahan data dilaksanakan melalui lima tahapan sistematis:

1. **Pengorganisasian Data:** Mentranskripsi seluruh hasil rekaman audio FGD secara verbatim dan menyatukan lembar temuan *ex post facto*.
2. **Koding Awal (*Initial Coding*):** Membaca ulang transkrip untuk memberikan kode awal (*codes*) pada fakta, kendala, dan praktik baik yang ditemukan di lapangan.
3. **Kategorisasi dan Tematisasi:** Mengelompokkan kode-kode relevan ke dalam tema-tema

utama (seperti keterbatasan sosialisasi, kendala infrastruktur 3T, integrasi budaya kerja, dan penguatan *roadmap*).

4. **Sintesis dan Rekonsiliasi:** Membandingkan pola temuan antar-kelompok wilayah untuk mengidentifikasi titik temu (*consensus*) serta perbedaan mendasar dalam pelaksanaan program kesiswaan.
5. **Perumusan Rekomendasi:** Menyusun rumusan temuan ilmiah dan kerangka rekomendasi kebijakan secara koheren yang disetujui secara kolektif oleh seluruh partisipan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan dua tahapan penting yang sangat menentukan kualitas proses pendidikan sejak awal. Namun, dalam implementasinya, berbagai permasalahan masih ditemukan yang berdampak pada efektivitas kedua program tersebut. Identifikasi masalah yang muncul pada SPMB antara lain terkait dengan sosialisasi yang belum optimal, keterbatasan akses teknologi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana (sarpras) yang memadai untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendaftar ke SMK. Selain itu, keterlambatan distribusi petunjuk teknis (juknis) di beberapa daerah menyebabkan hambatan administratif, sementara kekhawatiran akan terjadinya bullying terhadap ABK yang diterima di SMK masih menjadi isu sensitif yang membutuhkan perhatian khusus.

Pada sisi lain, pelaksanaan MPLS juga menghadapi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah keterlambatan penyebaran pedoman pelaksanaan MPLS yang menyebabkan sekolah tidak dapat melakukan persiapan secara optimal. Durasi pelaksanaan MPLS yang dinilai terlalu singkat berdampak pada kurang maksimalnya penyampaian materi kepada peserta didik baru. Selain itu, materi literasi dan numerasi yang seharusnya menjadi bagian wajib MPLS belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum pengenalan, sehingga siswa baru belum mendapatkan bekal dasar yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran di SMK.

Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas SPMB dan MPLS sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Untuk SPMB, peningkatan sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, baik melalui media daring maupun luring, sangat penting agar seluruh calon peserta didik dan orang tua memperoleh informasi yang jelas dan tepat waktu. Penambahan

akses teknologi dan jaringan di wilayah 3T juga menjadi prioritas agar tidak ada siswa yang terhambat dalam proses pendaftaran. Bagi ABK, perlu adanya upaya penguatan kerjasama lintas sektor untuk mengarahkan mereka ke sekolah khusus yang lebih siap secara SDM dan sarpras, namun tetap menjamin hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang inklusif. Kerjasama dengan dinas terkait juga harus diperkuat guna mempercepat distribusi juknis, serta sosialisasi anti-bullying harus diintensifkan kepada seluruh warga sekolah.

Dalam konteks MPLS, percepatan penyebaran pedoman pelaksanaan menjadi sangat krusial agar sekolah dapat mempersiapkan kegiatan dengan baik. Penyesuaian durasi pelaksanaan MPLS minimal lima jam per hari diperlukan agar materi dapat disampaikan secara komprehensif dan peserta didik baru memperoleh pengalaman yang utuh dalam mengenal lingkungan sekolah. Penambahan materi literasi dan numerasi dalam MPLS juga harus menjadi perhatian utama sebagai bekal awal siswa dalam mengikuti pembelajaran di SMK.

Praktik baik yang telah diterapkan antara lain keberadaan posko layanan pengaduan SPMB yang mudah diakses masyarakat, penerapan pendaftaran daring yang meningkatkan kecepatan dan transparansi proses seleksi, serta pemetaan bakat dan minat sebelum penjurusan yang memudahkan siswa menentukan jurusan sesuai potensi. Proses silang posko verifikator antara SMK dan SMA juga menjadi langkah preventif terhadap potensi praktik KKN. Dalam pelaksanaan MPLS, penambahan materi dan perubahan durasi menjadi lima hari pelaksanaan memberikan waktu yang cukup untuk mengenalkan lingkungan sekolah secara menyeluruh kepada siswa baru. Materi MPLS yang telah disesuaikan dengan kebutuhan murid baru, serta kesempatan bagi siswa baru untuk menyaksikan langsung demo ekstrakurikuler dari kakak kelas, memberikan pengalaman yang lebih kaya dan membangun motivasi.

Sebagai rekomendasi, Direktorat SMK dapat melaksanakan program konkret seperti menghadirkan Wakasek Kesiswaan dalam kegiatan sosialisasi pra-SPMB dan pra-MPLS selama empat hari untuk memastikan seluruh informasi tersampaikan dengan baik. Selain itu, perlu adanya keseragaman program kerja kesiswaan secara nasional dan pembentukan Forum Wakasek Kesiswaan SMK Nasional secara legal sebagai wadah koordinasi, berbagi praktik baik, dan advokasi kebijakan di tingkat nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan SPMB dan MPLS di SMK akan semakin efektif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan serta tantangan di lapangan.

Pelaksanaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan di SMK menjadi aspek krusial dalam mendukung perkembangan karakter dan prestasi akademik siswa. Namun, sejumlah permasalahan masih ditemukan dalam penguatan pendidikan karakter, implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), pelaksanaan pertemuan pagi ceria, serta pencegahan dan penanganan

kekerasan di satuan pendidikan. Dalam penguatan pendidikan karakter, guru-guru belum sepenuhnya terlatih dalam program ini sehingga implementasinya belum optimal. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan media digital negatif turut menghambat pembentukan karakter positif. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan karakter juga masih rendah, sementara fasilitas sekolah yang mendukung pelaksanaan program ini belum memadai.

Implementasi 7KAIH menghadapi berbagai kendala, seperti kebiasaan bangun pagi yang terganggu oleh pola tidur tidak teratur, kecanduan bermain game, dan aktivitas yang melelahkan. Aspek beribadah juga dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan kesadaran diri siswa, sedangkan olahraga terhambat oleh rasa malas, kurangnya fasilitas, dan pengaruh penggunaan ponsel. Kebiasaan makan sehat dan bergizi masih rendah akibat minimnya edukasi dari orang tua, dominasi makanan cepat saji di kantin sekolah, serta pengaruh iklan dan faktor ekonomi. Motivasi belajar siswa juga menurun karena kurangnya teladan dari guru dan orang tua, lingkungan pergaulan yang kurang mendukung, serta metode pembelajaran yang membosankan. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membangun kebiasaan positif secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pertemuan pagi ceria yang meliputi senam Anak Indonesia Hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa juga belum optimal. Keterlibatan siswa dalam senam masih kurang, dan pelaksanaannya berbeda antara sekolah besar dan kecil. Kesadaran nasionalisme saat menyanyikan lagu kebangsaan juga belum merata, sementara pelaksanaan doa masih terganggu oleh kurangnya khusyuk dan gangguan antar siswa. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian pelaksanaan yang lebih fleksibel dan pendekatan yang mampu meningkatkan antusiasme siswa secara efektif.

Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan menjadi perhatian serius. Bentuk kekerasan yang ditemukan meliputi fisik, psikis, perundungan (bullying), cyber bullying, dan kekerasan seksual. Kondisi ini menuntut pengembangan program pencegahan yang sistematis, peningkatan kesadaran seluruh warga sekolah, serta kerja sama dengan pihak berwenang untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban. Pembentukan tim penanganan kekerasan dan prosedur yang jelas menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar aman dan nyaman bagi siswa.

Refleksi terhadap kebutuhan pelaksanaan lingkungan belajar yang kondusif menegaskan pentingnya pelatihan dan bimbingan bagi guru dalam program pendidikan karakter, edukasi literasi digital, serta pembinaan sikap yang melibatkan kontrol pemerintah dan komunikasi aktif dengan orang tua dan masyarakat. Penggunaan aplikasi digital berbasis sistem poin siswa dapat menjadi inovasi untuk memantau perkembangan karakter siswa secara lebih terstruktur. Konsistensi dalam pengisian catatan

harian terkait 7KAIH juga diperlukan untuk mengontrol dan membiasakan kebiasaan positif pada siswa.

Praktik baik yang telah dijalankan mencakup in-house training dan workshop rutin bagi guru dan tenaga kependidikan tentang strategi pembelajaran berbasis karakter, kampanye bijak bermedsos, program mentoring antar siswa, serta kegiatan family gathering dan parenting day untuk memperkuat nilai-nilai karakter di keluarga dan masyarakat. Dalam implementasi 7KAIH, sekolah telah menerapkan jurnal bangun pagi, olahraga terjadwal, sosialisasi makanan sehat, pojok literasi, serta kegiatan bermasyarakat yang melibatkan orang tua dan komunitas sekitar. Pertemuan pagi ceria dilakukan secara fleksibel, dengan senam dilaksanakan di kelas oleh guru PJOK, menyanyikan lagu kebangsaan di kelas pada jam pelajaran pertama, dan doa yang dipimpin secara bergantian oleh siswa. Untuk pencegahan kekerasan, pengembangan program pencegahan, peningkatan kesadaran, dan kerja sama dengan pihak berwenang menjadi fokus utama.

Usulan konkret bagi Direktorat SMK mencakup pelaksanaan in-house training dan retreat bagi guru tentang pembelajaran berbasis karakter, pembatasan penggunaan media sosial bagi pelajar, pelatihan parenting day bagi orang tua dan tokoh masyarakat, serta penyediaan pedoman fasilitas sekolah yang memadai. Penguatan infrastruktur dan sarana untuk pemantauan digital 7KAIH, sosialisasi intensif, integrasi program dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta pemberian insentif dan apresiasi diharapkan dapat menjadikan 7KAIH sebagai budaya sekolah yang melekat. Pelaksanaan pertemuan pagi ceria disarankan dilakukan secara fleksibel menyesuaikan kapasitas sekolah, sedangkan pencegahan kekerasan memerlukan pembentukan tim penanganan, prosedur yang jelas, dukungan korban, pelatihan, serta kerja sama dengan pihak berwenang. Program pendukung seperti ekstrakurikuler, pengawasan sekolah, sistem pelaporan, dan evaluasi berkala juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi seluruh siswa SMK.

Roadmap Kalender Akademik Kesiswaan

Roadmap kalender akademik kesiswaan menghadapi berbagai tantangan yang berbeda di tiap jenjang kelas dan membutuhkan perhatian khusus. Di tingkat kelas 10, murid masih kesulitan mengenali lingkungan sekolah, budaya, aturan, serta potensi diri mereka, sementara kesalahpahaman antara sekolah dan orang tua juga kerap muncul. Selanjutnya, di kelas 11, masalah bergeser pada rendahnya etos kerja dan kompetensi siswa, yang diperparah dengan adanya bullying dan keterbatasan fasilitas pendukung seperti guru BK. Di kelas 12, tantangan yang muncul adalah kurang optimalnya coaching dan peer teaching, rendahnya kesiapan kebekerjaan, serta minimnya jiwa kewirausahaan dan pola pikir berkembang, sehingga membutuhkan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi. Penelitian ini

sejalan dengan penelitian Barber dan Netherton (2018), Niittylahti et al. (2023), serta O'Shea et al. (2012) yang menegaskan bahwa peserta didik pendidikan vokasi mengalami dinamika transisi psikososial dan akademis yang terstruktur secara berjenjang di setiap tingkatan kelas. Perbandingan dengan studi internasional di Finlandia oleh Niittylahti et al. (2023) dan Australia oleh Goh dan Zukas (2016) mengonfirmasi bahwa kendala adaptasi awal kelas 10 dan penurunan motivasi di pertengahan studi (*mid-study slump*) merupakan fenomena global dalam pendidikan kejuruan yang memerlukan intervensi kesiswaan yang terarah. Ketiadaan pendampingan BK yang memadai di kelas 11 berisiko memperparah angka perundungan dan dekadensi etos kerja. Secara teoretis, analisis tahap perkembangan ini memberikan kontribusi penting bagi keilmuan manajemen kesiswaan vokasi dengan mendokumentasikan pemetaan hambatan spesifik (*grade-specific bottleneck*) sebagai dasar perancangan intervensi pedagogis dan konseling yang presisi.

Roadmap perlu disusun berdasarkan analisis kebutuhan murid di setiap tingkat kelas. Di kelas 10, fokus utama adalah memfasilitasi adaptasi murid melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), kontrak belajar, serta penguatan budaya kerja dan karakter agar murid memiliki kesadaran dan motivasi yang kuat. Sementara itu, kelas 11 memerlukan penguatan karakter dan kompetensi yang lebih dalam, didukung oleh lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman agar murid siap menghadapi tantangan akademik dan sosial. Sedangkan di kelas 12, pengembangan kesiapan kerja, kecerdasan finansial, pola pikir growth mindset, dan strategi pencapaian sukses menjadi aspek penting agar lulusan mampu bersaing di dunia kerja maupun berwirausaha secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arifin (2022), Haryani dan Purwanto (2026), serta Tull dan Kuk (2023) yang menyatakan bahwa perancangan kalender kesiswaan harus berorientasi pada pencapaian kompetensi holistik dan kesiapan karir lulusan. Komparasi dengan skema pelatihan vokasi di Nicaragua sebagaimana diulas oleh Webster dan Sausner (2017) menunjukkan bahwa penyelarasan antara penguatan karakter dasar dan keterampilan finansial/kewirausahaan secara bertahap terbukti mampu menekan angka pengangguran terdidik. Integrasi *growth mindset* dan kecerdasan finansial di kelas 12 bertindak sebagai jembatan kritis (*transition bridge*) dari ekosistem sekolah menuju tuntutan riil dunia industri. Sintesis ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kurikulum kesiswaan berbasis *developmental pathway*, di mana pembentukan karakter tidak lagi diperlakukan sebagai kegiatan incidental melainkan bagian integral dari kalender akademik tahunan.

Pelaksanaan roadmap yang efektif menuntut praktik baik berupa koordinasi yang sistematis dan kerja sama berbagai pihak. Misalnya, di kelas 10, keberhasilan MPLS dan pengenalan diri dapat dicapai dengan dukungan petunjuk teknis yang jelas, kolaborasi dengan puskesmas, serta pengawasan ketat

terhadap kontrak belajar yang melibatkan murid dan orang tua. Di kelas 11, kerja sama dengan dunia industri dalam pelaksanaan uji kompetensi dan pendidikan anti-bullying menjadi kunci pembentukan ekosistem belajar yang kondusif. Sedangkan di kelas 12, strategi coaching yang terstruktur dan pelatihan wawancara kerja serta kewirausahaan memberikan bekal yang kuat bagi murid untuk menghadapi dunia kerja. Pendekatan ini memastikan roadmap tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga pedoman yang aplikatif dan berdampak nyata. Penelitian ini sejalan dengan studi Gibson dan Busby (2009), Hermawan (2026), serta Dietlin et al. (2025) yang menyoroti bahwa efektivitas program kesiswaan sangat ditentukan oleh kepemimpinan jaringan (*networked leadership*) dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dibandingkan dengan praktik kemitraan vokasi di Australia yang diteliti oleh Nyland dan Tran (2020) serta Baston (2018), pelibatan dunia industri, fasilitas kesehatan, dan orang tua secara formal dalam pengawasan kontrak belajar merupakan bentuk inovasi lokal yang memperkuat akuntabilitas sekolah. Praktik *peer coaching* dan simulasi wawancara kerja terbukti efektif meningkatkan efikasi diri (*self-efficacy*) murid secara signifikan. Hasil analisis ini memberikan implikasi praktis yang nyata bagi sekolah vokasi dalam membangun ekosistem pendukung (*support system*) yang terintegrasi, yang menyatukan peran akademisi, praktisi industri, dan keluarga dalam mengawal transisi peserta didik.

Direktorat SMK perlu mengimplementasikan program-program konkret yang sesuai dengan kebutuhan tiap jenjang. Di kelas 10, program seperti pemetaan bakat minat, MPLS, kontrak belajar, serta sosialisasi budaya kerja dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sangat penting. Di kelas 11, penguatan karakter, kompetensi, pembentukan ekosistem belajar yang menyenangkan, praktik kerja lapangan, dan layanan konseling harus menjadi fokus. Sementara itu, kelas 12 memerlukan pelaksanaan coaching, pelatihan soft skill dan hard skill, pembuatan portofolio digital, bursa kerja, dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi. Dengan langkah-langkah ini, roadmap kalender akademik kesiswaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan murid secara komprehensif untuk menghadapi tantangan masa depan. Temuan dan rekomendasi ini sejalan dengan pemikiran Fathulloh dan Sutiman (2026), Wibowo Khurniawan et al. (2026), Eka Panca Sakti (2026), serta Allen dan Garb (1993) mengenai urgensi reorientasi strategi kesiswaan yang adaptif di era digital dan berorientasi ekonomi kreatif. Penggunaan portofolio digital dan bursa kerja khusus (*specialized job fair*) merupakan respons inovatif yang sejalan dengan tren manajemen kesiswaan global dalam memfasilitasi visibilitas keterampilan siswa. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan (*research limitations*), di mana pengumpulan data berbasis perwakilan Wakasek Kesiswaan melalui FGD dan *ex post facto* belum secara langsung mengukur tingkat kepuasan siswa serta keberhasilan penyerapan lulusan secara kuantitatif-longitudinal. Terlepas dari keterbatasan tersebut, sintesis

penelitian ini menyumbang kontribusi kebijakan (*policy contribution*) yang berharga bagi Direktorat SMK dalam merumuskan Panduan Nasional Kalender Akademik Kesiswaan Berjenjang yang terstandarisasi namun fleksibel terhadap karakteristik daerah.

Pemetaan Kompetensi dan Bakat minat murid

Pemetaan kompetensi dan bakat minat murid melalui gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler saat ini menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu hambatan utama adalah menurunnya minat murid untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyalurkan potensi mereka. Selain itu, kurangnya tenaga pembina dan pelatih yang kompeten turut mengurangi efektivitas pengembangan bakat dan minat murid. Permasalahan pendanaan juga menjadi kendala penting, terutama karena keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana BOS dan kebijakan pendidikan gratis yang membatasi alokasi dana untuk kegiatan non-akademik. Waktu pelaksanaan ekstrakurikuler yang terbatas, dukungan orang tua yang kurang optimal, serta sedikitnya kesempatan unjuk prestasi di ajang resmi turut menyulitkan perkembangan murid. Bahkan, penghapusan beberapa cabang lomba beregu di O2SN menambah tantangan bagi murid yang berminat pada bidang olahraga. Penelitian ini sejalan dengan temuan Arifin (2022) serta Niittylahti et al. (2023) yang menegaskan bahwa pengelolaan kesiswaan dan keterlibatan peserta didik (*student engagement*) dalam pendidikan vokasi sering kali terhambat oleh keterbatasan alokasi sumber daya struktural dan fleksibilitas manajerial. Secara komparatif, studi internasional oleh Stewart dan Williams (2010) serta Webster dan Sausner (2017) juga menunjukkan bahwa tantangan ketersediaan dana dan fasilitas non-akademik merupakan isu universal yang dialami oleh pengelola lembaga vokasi di berbagai negara berkembang maupun maju. Keterbatasan instrumen pendukung ini berdampak langsung pada stagnasi diferensiasi bakat siswa, di mana fleksibilitas anggaran yang kaku berisiko mematikan kreativitas dan motivasi ekstra-kurikuler. Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperjelas bagaimana hambatan fiskal dan regulasi operasional di tingkat sekolah dapat merepresi potensi non-akademik siswa vokasi, sehingga mendesak dibutuhkannya reorientasi kebijakan tata kelola kesiswaan yang lebih responsif.

Beberapa sekolah telah menerapkan berbagai praktik yang terbukti efektif dalam meningkatkan pemetaan kompetensi dan bakat minat murid. Pembentukan satuan tugas khusus untuk mengidentifikasi bakat dan minat murid serta pelibatan aktif orang tua dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi murid. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana melalui penyewaan fasilitas eksternal dan pengajuan bantuan ke pihak sekolah memberikan kontribusi positif. Keterbatasan tenaga pembina berhasil diatasi dengan melibatkan alumni serta bekerja

sama dengan instansi terkait sebagai pelatih atau pembina tambahan. Dari sisi pendanaan, penggalangan sumbangan sukarela, pemanfaatan dana internal sekolah, dan pencarian sponsor dari pihak ketiga memperluas sumber dana yang tersedia. Koordinasi yang baik dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan sarana prasarana memungkinkan pengaturan jadwal ekstrakurikuler secara lebih optimal. Sementara itu, penyelenggaraan kegiatan parenting dan gelar karya murid yang melibatkan orang tua dan masyarakat turut memperkuat dukungan sosial bagi pengembangan bakat dan minat murid. Temuan mengenai praktik baik ini sejalan dengan penelitian Hermawan (2026), Dietlin et al. (2025), serta Verma et al. (2024) yang menyoroti pentingnya kepemimpinan kolaboratif (*servant leadership*) dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) dalam membangun kapabilitas organisasi pendidikan. Dibandingkan dengan praktik pengorganisasian kesiswaan secara global sebagaimana diulas oleh Kuk dan Banning (2009) serta Baston (2018), pendekatan berbasis kemitraan lintas sektor dan partisipasi masyarakat terbukti ampuh mengatasi defisit anggaran formal serta keterbatasan internal sekolah. Keterlibatan aktif alumni dan komunitas lokal tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan pembina teknis, melainkan juga memperkuat ekosistem jaringan kerja (*networking*) bagi siswa vokasi. Hasil analisis sintesis ini memberikan kontribusi praktis yang signifikan bagi dunia pendidikan dalam merumuskan strategi kepemimpinan kesiswaan berbasis pemberdayaan komunitas (*community-based student affairs management*), yang terbukti efektif meningkatkan motivasi belajar serta efikasi diri siswa tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN.

Langkah-langkah tersebut dapat menjadi pijakan penting bagi Direktorat SMK untuk menginisiasi program-program strategis dalam meningkatkan pemetaan kompetensi dan bakat minat murid melalui gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler. Penyelenggaraan event kepanduan dan ekstrakurikuler secara berjenjang akan meningkatkan motivasi dan memperluas partisipasi murid. Program sertifikasi bagi guru sebagai pembina pramuka dan ekstrakurikuler diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan secara profesional. Kerja sama dengan pihak eksternal dalam bentuk pelatihan dan workshop yang sesuai dengan minat murid dapat memperkaya kompetensi serta mendukung perkembangan bakat secara maksimal. Melalui pelaksanaan program-program ini, diharapkan tercipta ekosistem pembelajaran non-formal yang kondusif, sehingga kompetensi dan bakat minat murid dapat tumbuh dan berkembang secara menyeluruh dan berkelanjutan. Rekomendasi strategis ini sejalan dengan pemikiran Wibowo Khurniawan et al. (2026), Fathulloh dan Sutiman (2026), serta Porterfield et al. (2011) yang menekankan pentingnya reorientasi misi kesiswaan dan peningkatan kapasitas profesional pendidik dalam menghadapi era transformasi vokasi. Perbandingan dengan kebijakan pengembangan kompetensi guru di negara-negara maju seperti dikaji oleh Goh dan Zukas (2016) mengonfirmasi bahwa sertifikasi kesiswaan dan pelatihan terstruktur bagi pembina ekstrakurikuler merupakan standar mutu

mutlak untuk menjamin kualitas pendampingan peserta didik. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan (*research limitations*), antara lain berfokus pada perspektif kualitatif perwakilan Wakasek Kesiswaan dalam rentang waktu pelaksanaan yang terbatas, sehingga belum mengukur secara longitudinal dampak empiris dari sertifikasi pembina terhadap tingkat kebekerjaan (*employability*) siswa. Terlepas dari keterbatasan tersebut, sintesis penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam memperkaya domain manajemen kesiswaan vokasi, serta memberikan implikasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi kementerian dalam merancang standar pembinaan kesiswaan yang terintegrasi antara pendidikan karakter, kepemimpinan kepanduan, dan kesiapan kerja global.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program kesiswaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Indonesia—meliputi SPMB, MPLS, pendidikan karakter, 7KAIH, roadmap akademik, hingga pemetaan bakat minat—telah memiliki landasan praktik baik namun masih terkendala hambatan sistemis. Capaian utama program kesiswaan terwujud melalui penguatan MPLS berbasis budaya kerja serta integrasi nilai karakter yang didukung pelibatan alumni dan orang tua. Kendala mendasar yang ditemukan bersumber dari keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah 3T, minimnya fasilitas untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), serta durasi dan sosialisasi petunjuk teknis yang belum optimal. Selain itu, baru sekitar 27% SMK yang memiliki *teaching factory* aktif, yang mengindikasikan masih tingginya kesenjangan antara program kesiswaan dengan kebutuhan riil dunia kerja. Dengan demikian, penguatan kesiswaan SMK secara nasional memerlukan sinkronisasi kebijakan yang inklusif, terstruktur, dan berbasis bukti di seluruh tingkatan kelas.

Efektivitas pencapaian kesimpulan dan program kesiswaan ini dicapai melalui pendekatan deliberatif terintegrasi antara metode *ex post facto* dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan para Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan dari berbagai provinsi. Kolaborasi ini memfasilitasi identifikasi masalah secara akurat sekaligus memetakan praktik terbaik berbasis pengalaman langsung para praktisi di lapangan. Dampak positif program terakselerasi melalui penyusunan *roadmap* akademik kesiswaan berjenjang yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Penerapan instrumen digital pemantauan karakter dan keterlibatan aktif ekosistem sekolah—termasuk mitra industri dan komunitas—menjadi pendorong utama transformasi perilaku siswa. Sinergi antar-pemangku kepentingan tersebut terbukti memperkuat efektivitas program kesiswaan dalam membina kedisiplinan, karakter, dan kesiapan kerja lulusan vokasi.

Mengingat keterbatasan penelitian yang berfokus pada evaluasi *ex post facto* dan diskusi FGD

singkat, penelitian masa depan disarankan menggunakan pendekatan longitudinal kuantitatif. Studi lanjutan perlu mengukur secara empiris dampak langsung implementasi sistem poin digital 7KAIH terhadap tingkat kebekerjaan (*employability*) lulusan SMK. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi model pendanaan alternatif dan efektivitas pembentukan Forum Wakasek Kesiswaan SMK Nasional secara legal. Kajian khusus mengenai strategi afirmatif dan penyediaan sarana pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di wilayah 3T juga sangat diperlukan. Perluasan cakupan sampel dengan melibatkan persepsi langsung dari pihak industri dan orang tua murid akan memberikan gambaran evaluasi yang lebih holistik.

Dalam jangka panjang, riset dan pengembangan di bidang kesiswaan pendidikan vokasi berpotensi menjadi fondasi utama transformasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Penguatan kesiswaan yang terintegrasi tidak hanya melahirkan tenaga kerja yang mahir secara teknis, tetapi juga membentuk SDM yang adaptif, berkarakter unggul, dan berdaya saing global. Ekosistem SMK yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kemajuan teknologi digital serta prinsip *green economy* akan mempercepat keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia industri. Keberhasilan model pembinaan kesiswaan berbasis kolaborasi ini dapat menjadi acuan kebijakan nasional bagi reformasi pendidikan kejuruan di negara-negara berkembang lainnya. Pada akhirnya, visi ini mewujudkan lulusan vokasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga berjiwa wirausaha dan mampu berkontribusi aktif pada pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Referensi

Ade Roni, Suartini, T., & Suciati. (2026). WebCode apps: Mobile learning peningkat keterampilan pemrograman web statis siswa Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 20–30. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.17

Allen, K. E., & Garb, E. L. (1993). Reinventing student affairs: Something old and something new. *NASPA Journal*, *30*(2), 93–100. https://doi.org/10.1080/00220973.1993.11072299

Arifin, Z. (2022). Manajemen peserta didik sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, *8*(1), 71–89. https://doi.org/10.26594/dirasat.v8i1.3025

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025–2045*. Bappenas.

Barber, T., & Netherton, C. (2018). Transitioning between vocational and university education in Australia: The impact of the vocational education experience on becoming a university student. *Journal of Vocational Education & Training*, *70*(4), 600–618. https://doi.org/10.1080/13636820.2018.1463279

Barrett, A. M., Plate, M., Borasi, R., & Harris, N. F. (2025). Exploring artificial intelligence implications for higher education student affairs. *Journal of Student Affairs Research and Practice*, *62*(2), 116–128. https://doi.org/10.1080/19496591.2024.2424799

Baston, M. A. (2018). Elevating student affairs practice in community college redesign. *Community College Journal of Research and Practice*, *42*(11), 812–817. https://doi.org/10.1080/10668926.2018.1446057

Dietlin, O., Wahl, W., Bardill Moscaritolo, L., & Schreiber, B. (2025). Bridging worlds: Student affairs leaders as catalysts for connection. *Journal of Student Affairs Research and Practice*, *62*(2), 129–144. https://doi.org/10.1080/19496591.2024.2435890

Eka Panca Sakti, L. (2026). Inovasi produk kreatif limbah perca dalam meningkatkan ekonomi siswa Sekolah Menengah Kejuruan: Tinjauan literatur. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 166–180. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.23

Fathulloh, M. Z., & Sutiman. (2026). Kepemimpinan pendidikan vokasi era digital: Systematic review dampak mutu dan kompetensi. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 98–111. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.34

Gibson, P., & Busby, G. (2009). Experiencing work: Supporting the undergraduate hospitality, tourism and cruise management student on an overseas work placement. *Journal of Vocational Education & Training*, *61*(4), 467–480. https://doi.org/10.1080/13636820903231005

Goh, A. Y. S., & Zukas, M. (2016). Student vocational teachers: The significance of individual positions in workplace learning. *Journal of Vocational Education & Training*, *68*(2), 263–277. https://doi.org/10.1080/13636820.2016.1172661

Haryani, T., & Purwanto, A. (2026). Reorientasi mutu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan program empat tahun menuju kesiapan kerja global. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 126–144. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.21

Hermawan, A. (2026). Memperkuat kepemimpinan pelayan di sekolah vokasi swasta: Pendekatan POP-SDM. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 76–97. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.13

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Laporan pendidikan vokasi dan SMK tahun 2023*. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2024). *Rencana strategis Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan 2025–2029*. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Khurniawan, A. W., Erda, G., Tengku Irfan Wira, B., Tengku, A., Arisman, A., Susilawati, S., & Miftahus, S. (2026). Klasterisasi profil sekolah penerima bantuan revitalisasi SMK 2025 berbasis K-Medoids dan Gower distance. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 1–19. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.40

Kuk, L., & Banning, J. H. (2009). Designing student affairs organizational structures: Perceptions of senior student affairs officers. *NASPA Journal*, *46*(1), 94–117. https://doi.org/10.2202/1949-6605.5007

Lee, J. J., & Helm, M. (2013). Student affairs capitalism and early-career student affairs professionals. *Journal of Student Affairs Research and Practice*, *50*(3), 290–307. https://doi.org/10.1515/jsarp-2013-0021

Muhtar, Suryanti, & Musahrain, M. (2026). Tahap persiapan pengembangan model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi dengan desain Dick Carey. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 31–50. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.32

Mutucertification. (2023, Mei 17). *Menilik UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Indonesia*. https://mutucertification.com/uu-no-20-tahun-2003-sistem-pendidikan/

Niittylahti, S., Annala, J., & Mäkinen, M. (2023). Student engagement profiles in vocational education and training: A longitudinal study. *Journal of Vocational Education & Training*, *75*(2), 372–390. https://doi.org/10.1080/13636820.2021.1879902

Nyland, C., & Tran, L. T. (2020). The consumer rights of international students in the Australian vocational education and training sector. *Journal of Vocational Education & Training*, *72*(1), 71–87. https://doi.org/10.1080/13636820.2019.1597758

O'Shea, S., Lysaght, P., & Tanner, K. (2012). Stepping into higher education from the vocational education sector in Australia: Student perceptions and experiences. *Journal of Vocational Education & Training*, *64*(3), 261–277. https://doi.org/10.1080/13636820.2012.691532

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003

Pillsbury, M. K. M., et al. (2021). Human-centered implementation research: A new approach to develop and evaluate implementation strategies for strengthening referral networks for hypertension in western Kenya. *BMC Health Services Research*, *21*(1), 910. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06930-2

Porterfield, K. T., Roper, L. D., & Whitt, E. J. (2011). Redefining our mission: What does higher education need from student affairs? *Journal of College and Character*, *12*(4). https://doi.org/10.2202/1940-1639.1853

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78). https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf

Sandeen, A. (2011). Does student affairs have an enduring mission? *Journal of College and Character*, *12*(4). https://doi.org/10.2202/1940-1639.1852

Stewart, S. C., & Williams, T E. (2010). Preparing for fiscal leadership in student affairs: The senior

student affairs officer voice. *Journal of Student Affairs Research and Practice*, *47*(3), 274–290. https://doi.org/10.2202/1949-6605.6087

Sukardi. (2010). *Metodologi penelitian pendidikan*. Bumi Aksara.

Sulaiman Nasution, K., Ismara, K. I., & Putra Pratama, G. N. I. (2026). Faktor implementasi dan integrasi augmented reality dalam pembelajaran: Tinjauan sistematis. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 51–75. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.33

Tull, A., & Kuk, L. (2023). *New realities in the management of student affairs*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003446149

Verma, S., Raut, S. K., Narula, R., & Rao, P. (2024). Sustainability and capability building in organizations: A focused group approach. *FIIB Business Review*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/23197145241269203

Webster, N. S., & Sausner, E. B. (2017). A focused analysis of TVET: Unique opportunities and strategies for investing in and engaging youth in Nicaraguan society. *Journal of Vocational Education & Training*, *69*(4), 451–472. https://doi.org/10.1080/13636820.2017.1322128

Wibowo Khurniawan, A., Mukti Cahyono, S., & Nurmahmudah, F. (2026). Teacher learning reflections: Advancing deep learning pedagogy in vocational education. *Jurnal Vocational Education Policy*, *1*(1), 145–165. https://doi.org/10.66599/wp.v1i1.5